

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.

Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Fokusmedia, Bandung, 2009.

Andi Hamzah, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Andy Corry W, "Etika Berkomunikasi Dalam Penyampaian Aspirasi", *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, 2009.

Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Dey Ravena, "Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia", 2007.

Dini Dewi Heniarti, "Sistem Peradilan Militer Di Indonesia", PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.

Ernest Mandel, *Teori Organisasi Lenin*, Pena Hikmah, Jakarta, t.t.

H. Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006
- Husaini, Marjan, “Peyalahgunaan Wewenang Terkait Dengan Prosedur Penangkapan Terhadap Korban Yang Salah Tangkap”, *Qiara Media*, 2008.
- Inu Wicaksana, “Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa”, Kanisus, 2012.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Lukman Ali, (dkk), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Mardjono Reksodiputro, “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Kumpulan Karangan Buku Ke 111, Pusat Pelayanan Keadilan Universitas Indonesia, 1994.
- Mochtar Mas’oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Moeljanto, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, “Azaz-Azaz Hukum Pidana”, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Monio Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTITK, Jakarta, 1984.
- Muhtaj Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagarfindo Persada, Jakarta, 2009.
- Muladi, “Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasi Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi Kelima, UI Press, Jakarta, 1993.
- Nandang Sambas, "Pengantar Kriminologi", Cv Prisma Esta Utama, Bandung, 2010.
- Nurdiman, "Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara", Pribumi Mekar, Bandung, 2007.
- P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Roma K Smith et al, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta, 2009.
- Sajipto Raharjo, "Masalah Penegakan Hukum", Alumni, Bandung, 1995.
- Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum", Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Simanjuntak, "Pendidikan Kewarganegaraan", PT Gramedia Widiasarana Indonesia", 2007.
- Simon, R., *Gagasan-gagasan politik Gramsci*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Penerbit UI Press, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Solahuddin, *Pasal 351 KUHP dan KUHPperdata*. Visi Media, Jakarta, 2012.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 1999.

T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, PT. Djaya Pirusa, Jakarta, 1982.

T. Subarsyah Sumadikara, "Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Kriminal)", Kencana Utama, Bandung, 2010.

Tan Malaka, *Massa Aksi*, Segarsy, Bandung, 2016.

Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Tribowo, D, "Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi", Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.

B. Jurnal atau Artikel

Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Dewi Kartika Sari dan Royke R. Siahainenia, "Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah", *Jurnal Ilmu Komunikasi* vol. 1, 2015.

Dey Ravena, "Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia", 2007.

Dini Dewi (dkk.), "Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius

Constituendum”, Prosiding SNaPP2015 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora.

Dini Dewi Heniarti dan Sonny Aditiya Baskara, “Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Ditempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Tersangka Dihubungkan Dengan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian”, Vol. 3, No, 1, Februari 2017.

Dini Dewi Heniarti, “Peran Polisi”, Pikiran Rakyat, 2011, 27 Desember, Bandung.

Eka Juarsa, “Kebijakan Adjudikasi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Al’ Adl, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016.

Guntur Priyantoko, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa”, *De LegaLata*, Volume I, Nomor 1, Januari -Juni 2016.

Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, <http://www.docudesk.com>.

Kadri Husin, “Penegakan Hukum”, Seminar Nasional Kerjasama Polda Sumbagel Dengan Universitas Lampung, 1985.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, UIR Law Review, Volume 01, Nomor 01, 2017.

M. Ryan Syahbana, “Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, 2013.

Saiful Alam, “Upaya Non Penal Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Berpotensi Anarkis (Study Kasus Pada Polresta Pontianak)”, Jurnal Nestor Magister Hukum.

Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Jawa Barat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 7 No 1, 2016.

Yunita Dwi Aryani, “Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus”. *Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.3, 2011.

C. Peraturan dan Undang-Undang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009

PP Nomor 2 Tahun 2003.

Protap Kapolri No: Protap/ X/ 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 9 tahun 1998.